

RINGKASAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sejak tahun 2018 sudah mulai serius untuk memperbaiki kebijakan demi terciptanya pelayanan publik yang inklusi. Untuk menuju kabupaten yang ramah dengan difabel tentunya diperlukan komitmen yang tinggi terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang jaminan hak-hak fasilitas difabel tersebut di sekolah yang telah dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Purworejo. Rumusan Masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana kebijakan hukum pelayanan pendidikan inklusi dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo? Bagaimana kendala dalam menerapkan kebijakan pelayanan pendidikan inklusi dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hukum. Dalam konteks ini, peneliti akan menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data empiris yang relevan seperti wawancara dan survei kemudian menganalisis data tersebut dan dihasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pelayanan pendidikan inklusi di Kabupaten Purworejo, belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia untuk guru pendamping khusus (GPK), anggaran, sarana prasarana dan pemahaman guru, kepala sekolah dan orang tua. Data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kabupaten Purworejo, penulis mencoba untuk melakukan *cross check* ke sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Penulis melakukan observasi dan wawancara ke sekolah inklusi di daerah Kabupaten Purworejo. Dari hasil wawancara tersebut, sekolah sudah menerima anak berkebutuhan khusus pada setiap tahunnya. Tetapi dari tiga belas sekolah inklusi yang ditunjuk oleh kepala daerah Kabupaten Purworejo, masih terdapat sekolah yang belum menerima anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

SUMMARY

The local Government of Purworejo Regency since 2018 has begun to be serious about improving policies for the creation of inclusive public services. To move towards a disability-friendly district, of course, a high commitment to the implementation of Regional Regulations regarding the guarantee of the rights of disabled facilities in schools that already have them is needed. This study aims to find out the policy of fulfilling the right to education for children with special needs in Purworejo Regency. The formulation of the problem proposed in this study is: What is the legal policy of inclusive education services in the context of fulfilling the rights of persons with disabilities in Purworejo Regency? What are the obstacles in implementing the inclusive education service policy in the context of fulfilling the rights of persons with disabilities in Purworejo Regency?

The method used in this study is qualitative research with an empirical juridical approach and descriptive research specifications. This approach combines legal analysis with empirical data collection to answer research questions related to law. In this context, researchers will use scientific methods to collect relevant empirical data such as interviews and surveys and then analyze the data and draw conclusions.

The results of this study show that the legal policy of inclusive education services in Purworejo Regency is not optimal because there are still several obstacles, namely limited human resources for special assistant teachers (GPK), budget, infrastructure and understanding of teachers, principals and parents. Data obtained from the Purworejo Regency education office, the author tried to cross-check schools that organize inclusion education. The author conducted observations and interviews with inclusion schools in the Purworejo Regency area. From the results of the interview, the school has accepted children with special needs every year. But of the thirteen inclusion schools appointed by the regional head of Purworejo Regency, there are still schools that have not accepted children with special needs to study at the school.